

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

No.	Komoditas	Rata-Rata April	Rata-Rata Mei	Rata-Rata Juni
1	Beras Premium	Rp 16.000	Rp 16.000	Rp 16.000
2	Beras Medium	Rp 14.000	Rp 14.000	Rp 14.000
3	Beras Medium Non SPHP	Rp 14.000	Rp 14.000	Rp 14.000
4	Jagung Tk Peternak	Rp 8.500	Rp 8.500	Rp 8.500
5	Bawang Merah	Rp 44.286	Rp 44.524	Rp 44.702
6	Bawang Putih Bonggol	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000
7	Cabai Merah Keriting	Rp 27.500	Rp 26.875	Rp 27.344
8	Cabai Merah Besar	Rp 27.679	Rp 27.039	Rp 27.429
9	Daging Ayam Ras	Rp 37.738	Rp 37.173	Rp 36.597
10	Telur Ayam Ras	Rp 30.465	Rp 30.205	Rp 30.157
11	Gula Pasir Konsumsi	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000
12	Minyak Goreng Kemasan	Rp 23.000	Rp 23.000	Rp 23.000
13	Minyak Goreng Curah	Rp 22.572	Rp 22.714	Rp 22.821
14	Tepung Terigu Curah	Rp 10.667	Rp 10.667	Rp 10.667
15	Tepung Terigu Kemasan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000
16	Ikan Kembung	Rp 40.024	Rp 39.577	Rp 39.471
17	Ikan Tongkol	Rp 40.024	Rp 39.577	Rp 39.471
18	Garam Halus Beryodium	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000
19	Cabe Rawit Hijau	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000

Secara umum, perkembangan harga komoditas pada periode April-Juni menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Sebagian besar komoditas tidak mengalami perubahan harga, seperti beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam ras, dan beberapa komoditas lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa tekanan inflasi dari kelompok bahan pangan pada periode tersebut masih cukup terkendali. Secara keseluruhan, fluktuasi harga yang terjadi masih berada dalam

kisaran yang wajar sehingga belum menunjukkan adanya tekanan inflasi yang signifikan di Kabupaten Nias Selatan. Untuk barang kebutuhan pokok dan penting (Bapokting) secara umum menunjukkan harga yang stabil dengan perubahan yang relatif kecil pada beberapa komoditas sementara barang lainnya juga tidak memperlihatkan lonjakan harga yang berarti sehingga tidak memberikan tekanan tambahan terhadap inflasi daerah. Stabilitasnya harga sebagian besar komoditas menunjukkan efektivitas pengendalian pasokan dan distribusi di daerah. Meskipun demikian, pemerintah daerah bersama TPID perlu terus memperkuat pemantauan harga, menjaga kelancaran distribusi, serta memastikan ketersediaan stok pangan untuk mengantisipasi potensi tekanan inflasi pada periode-periode dengan permintaan yang meningkat atau ketika terjadi gangguan pasokan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan II Tahun 2026, pengendalian inflasi di Kabupaten Nias Selatan masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh karakteristik wilayah kepulauan dan ketergantungan pasokan dari luar daerah. Sebagian komoditas pangan strategis, seperti beras, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, dan beberapa komoditas lainnya, masih dipenuhi melalui pasokan dari daerah lain. Kondisi tersebut menyebabkan perkembangan harga di Kabupaten Nias Selatan sangat dipengaruhi oleh dinamika harga di daerah pemasok. Selain itu, tingginya biaya distribusi serta potensi gangguan transportasi akibat kondisi cuaca menjadi faktor yang dapat memengaruhi kelancaran pasokan dan memicu kenaikan harga komoditas tertentu. Produksi pangan lokal yang belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat juga menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian inflasi daerah. Beberapa komoditas hortikultura masih mengalami fluktuasi produksi yang dipengaruhi oleh faktor musim dan curah hujan, sehingga berdampak pada perubahan harga di tingkat konsumen. Di samping itu, keterbatasan sarana penyimpanan dan distribusi komoditas pangan menyebabkan upaya menjaga ketersediaan stok belum optimal. Meskipun berdasarkan hasil pemantauan harga selama Triwulan II Tahun 2026 sebagian besar komoditas kebutuhan pokok menunjukkan harga yang relatif stabil dengan fluktuasi yang masih terkendali, pemantauan harga dan stok secara berkelanjutan tetap diperlukan sebagai langkah antisipatif terhadap potensi gejolak harga. Ke depan, risiko inflasi di Kabupaten Nias Selatan masih perlu diwaspadai, terutama yang bersumber dari gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem, peningkatan biaya transportasi dan logistik, serta kenaikan permintaan pada periode tertentu. Oleh karena itu, TPID Kabupaten Nias Selatan perlu terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Bank Indonesia, Perum Bulog, serta seluruh perangkat daerah terkait dalam melaksanakan strategi pengendalian inflasi melalui keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, mempertahankan inflasi daerah pada tingkat yang terkendali, serta mendukung terjaganya daya beli masyarakat dan ketahanan pangan di Kabupaten Nias Selatan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah pada Triwulan II Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melaksanakan berbagai kebijakan pengendalian inflasi melalui penguatan sinergi antarperangkat daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan terkait. Kebijakan

tersebut diarahkan untuk memastikan keterjangkauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, dan memperkuat komunikasi kepada masyarakat sesuai dengan strategi pengendalian inflasi 4K. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah Gerakan Pangan Murah (GPM) yang bertujuan menyediakan bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, Perum Bulog, pelaku usaha pangan, serta instansi terkait guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang stabil sekaligus menjaga pasokan pangan di wilayah. Selain itu, TPID juga melaksanakan Operasi Pasar pada komoditas tertentu apabila terdapat indikasi kenaikan harga atau keterbatasan pasokan. Operasi pasar menjadi salah satu instrumen stabilisasi harga yang efektif untuk menjaga keterjangkauan harga dan mencegah terjadinya gejolak harga yang dapat memengaruhi tingkat inflasi daerah. Di samping upaya stabilisasi harga melalui intervensi pasar, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan juga mendorong peningkatan produksi pangan melalui Gerakan Menanam dengan memanfaatkan lahan pekarangan maupun lahan produktif yang dimiliki masyarakat. Kegiatan ini difokuskan pada pengembangan komoditas hortikultura, seperti cabai dan sayuran, yang selama ini berkontribusi terhadap fluktuasi inflasi. Melalui Gerakan Menanam diharapkan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat berkurang, ketersediaan pangan lokal semakin meningkat, serta ketahanan pangan masyarakat menjadi lebih kuat. Pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nias Selatan secara berkelanjutan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Nias Selatan pada Triwulan II Tahun 2026 secara umum menunjukkan hasil yang cukup baik. Berbagai langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), seperti pemantauan harga dan ketersediaan stok pangan, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, serta Gerakan Menanam, telah berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga komoditas kebutuhan pokok. Hal ini tercermin dari perkembangan harga pada sebagian besar komoditas strategis yang relatif stabil selama periode April-Juni 2026, sehingga tekanan inflasi daerah dapat tetap terkendali. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan masih menghadapi beberapa tantangan. Ketergantungan pasokan terhadap daerah lain menyebabkan stabilitas harga komoditas tertentu masih dipengaruhi oleh kondisi di luar Kabupaten Nias Selatan. Selain itu, tingginya biaya distribusi, keterbatasan infrastruktur logistik, serta faktor cuaca yang dapat menghambat kelancaran transportasi masih menjadi kendala dalam menjaga kesinambungan pasokan. Pada sisi hulu, produksi pangan lokal, khususnya komoditas hortikultura, belum mampu memenuhi kebutuhan secara optimal sehingga fluktuasi harga pada komoditas tertentu masih berpotensi terjadi. TPID Kabupaten Nias Selatan perlu terus memperkuat sinergi antarperangkat daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, dan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan strategi pengendalian inflasi. Penguatan sistem pemantauan harga dan stok secara berkala, peningkatan produksi pangan lokal, optimalisasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar yang lebih tepat sasaran, serta perluasan Gerakan Menanam perlu terus didorong untuk meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi. Dengan langkah tersebut, diharapkan stabilitas harga dapat terus terjaga, risiko gejolak inflasi dapat diminimalkan, dan daya beli masyarakat Kabupaten Nias Selatan tetap terpelihara.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan perkembangan harga komoditas strategis dan hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian inflasi pada Triwulan II Tahun 2026, diperlukan penguatan berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas harga dan mengantisipasi potensi tekanan inflasi pada periode berikutnya. TPID Kabupaten Nias Selatan perlu terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Bank Indonesia, Perum Bulog, serta seluruh perangkat daerah terkait dalam rangka memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan efektivitas komunikasi kepada masyarakat. Sinergi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting mengingat sebagian komoditas strategis masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Dalam aspek ketersediaan pasokan, perlu dilakukan penguatan produksi pangan lokal melalui perluasan Gerakan Menanam, pengembangan kawasan sentra produksi hortikultura, pemberian pendampingan kepada petani, serta peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan. Di sisi hilir, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar perlu dilaksanakan secara lebih terarah berdasarkan hasil pemantauan harga dan stok, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pada saat terjadi gejolak harga. Selain itu, perlu diperkuat koordinasi dengan Perum Bulog dan distributor untuk menjaga kecukupan stok serta kelancaran distribusi komoditas pangan strategis ke seluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya, penguatan sistem pemantauan harga dan ketersediaan stok secara berkala perlu terus dioptimalkan melalui peningkatan koordinasi antarperangkat daerah dan pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan. Upaya komunikasi yang efektif kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui penyampaian informasi perkembangan harga, edukasi mengenai konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, serta kampanye pemanfaatan pangan lokal sebagai alternatif konsumsi. Dengan implementasi rekomendasi tersebut, diharapkan pengendalian inflasi di Kabupaten Nias Selatan dapat berjalan lebih efektif, stabilitas harga tetap terjaga, ketahanan pangan daerah semakin kuat, dan daya beli masyarakat dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Berdasarkan perkembangan harga komoditas strategis dan hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian inflasi pada Triwulan II Tahun 2026, diperlukan penguatan berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas harga dan mengantisipasi potensi tekanan inflasi pada periode berikutnya. TPID Kabupaten Nias Selatan perlu terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Bank Indonesia, Perum Bulog, serta seluruh perangkat daerah terkait dalam rangka memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan efektivitas komunikasi kepada masyarakat. Sinergi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting mengingat sebagian komoditas strategis masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Dalam aspek ketersediaan pasokan, perlu dilakukan penguatan produksi pangan lokal melalui perluasan Gerakan Menanam, pengembangan kawasan sentra produksi hortikultura, pemberian pendampingan kepada petani, serta peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan. Di sisi hilir, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar perlu dilaksanakan secara lebih terarah berdasarkan hasil pemantauan harga dan stok, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pada saat terjadi gejolak harga. Selain itu, perlu diperkuat koordinasi dengan Perum Bulog dan distributor untuk menjaga kecukupan stok serta kelancaran distribusi komoditas pangan strategis ke seluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya, penguatan sistem pemantauan harga dan ketersediaan stok secara berkala perlu terus dioptimalkan melalui peningkatan koordinasi antarperangkat daerah dan pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan. Upaya komunikasi yang efektif

kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui penyampaian informasi perkembangan harga, edukasi mengenai konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, serta kampanye pemanfaatan pangan lokal sebagai alternatif konsumsi. Dengan implementasi rekomendasi tersebut, diharapkan pengendalian inflasi di Kabupaten Nias Selatan dapat berjalan lebih efektif, stabilitas harga tetap terjaga, ketahanan pangan daerah semakin kuat, dan daya beli masyarakat dapat dipertahankan secara berkelanjutan.